

BAB II

SISTEM PEMILU DI AMERIKA SERIKAT DAN KONTROVERSINYA

Pada bab ini akan membahas tentang tahapan dari pemilu Amerika Serikat, sistem pemilu Amerika Serikat yaitu sistem *Electoral College*, selain sistem pemilu, kemudian akan membahas tentang kontroversi sistem pemilu yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan solusi yang pernah ditawarkan untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada.

A. Pemilu Amerika Serikat

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses dimana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau menduduki jabatan pemerintah.

Di Amerika Serikat ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh seorang kandidat agar menjadi kandidat calon presiden di Amerika Serikat. Tahap- tahap tersebut meliputi :

A.1 Tahap Nominasi

Nominasi adalah tahapan untuk mendapatkan dukungan resmi dari partai politik kepada calon presiden. Ada 2 tradisi model nominasi yang dilakukan di Amerika, melalui sistem *Caucus* dan *Primary Election*. *Caucus* dan *primary* memiliki fungsi sama. Setiap negara bagian memiliki otonomi penuh, maka setiap negara bagian berhak menentukan model *electoral* mereka masing-masing.

a. *Caucus*

Caucus merupakan sistem pada tahapan nominasi dimana pada tahapan ini memberikan legitimasi bagi *elite-elite* (ketua) partai untuk menentukan kandidat calon presiden. Elit partai menentukan siapa yang akan dikirim sebagai delegasi dalam konvensi partai nasional. Dalam metode ini pimpinan partai secara otomatis mendapatkan kursi sebagai delegasi dalam

konvensi untuk menentukan kandidat presiden. Oleh karena itu pimpinan partai mempunyai kekuatan yang besar untuk mengontrol hasil dari tahapan ini. Tetapi, akhir-akhir ini penggunaan sistem *caucus* dalam menentukan para delegasi mulai berkurang dibandingkan dengan sistem *presidential primary Election*. (Budiatri, 2013)

b. Presidential Primary Election

Presidential Primary Election merupakan suatu tahapan nominasi dimana para pemilih mampu menentukan delegasi yang akan dikirim pada konvensi nasional. Dalam tahap ini bukan hanya elit *partai* yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan tetapi para pemilih. *Primary election* tidak hanya memilih delegasi namun juga merupakan indikasi awal apakah seorang calon dapat memenangkan pemilihan. Di setiap negara bagian memiliki sistem yang berbeda Ada dua model sistem *presidential primary*, yaitu:

- 1) *Primary Election* Terbuka, merupakan suatu tahapan dimana calon pemilih berhak menentukan kandidat yang Ia dukung, boleh memilih calon dari partai manapun Pada sistem ini setiap pemilih, baik anggota atau pendukung partai demokrat, republik atau independen, boleh memilih calon dari partai manapun. Contoh model terbuka ini seperti Alabama, Arkansas, Georgia, Hawaii, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Dakota Utara, Vermont, dan Wisconsin. (NCSL, 2016)
- 2) *Primary Election* Tertutup merupakan suatu tahapan dimana pemilih dapat memilih dipartai utama

dan sudah terdaftar sebagai anggota dari suatu partai sebelum hari pemilihan. Artinya, hanya anggota Partai Republik yg boleh ikut pemilihan *primary* calon presiden dari republik dan anggota Partai Demokrat yang ikut *primary* calon presiden dari demokrat. Negara bagian yang menerapkan sistem ini adalah Delaware, Florida, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, dan Wyoming (Priangani, 2013)

A.2 Konvensi Nasional

Konvensi nasional adalah pemilihan calon presiden dari masing-masing partai dilevel pertemuan nasional yang dilakukan oleh delegasi masing-masing negara bagian. (Indrayana, 2013)

Tahapan ini adalah yang akan menentukan siapa kandidat yang akan menjadi calon presiden yang maju dalam pemilu. Proses dalam konvensi Nasional ini berlangsung selama empat hari yang dimana yang menghadiri konvensi nasional ini adalah kelompok aktivis politik yang menjadi delegasi didalam konvensi nasional, di mana delegasi Demokrat adalah sekelompok orang liberal dan Republik dipenuhi oleh sekelompok orang konservatif. (Budiatri, 2013)

Ada empat fungsi konvensi nasional, yaitu

- a. Sebagai forum tertinggi untuk menentukan aturan main partai.
- b. Memilih kandidat calon presiden dan wakil presiden partai.
- c. Menggariskan platform partai.
- d. Menjadi forum konsolidasi.

e. Pendeklarasian kampanye kandidat presiden.

Mekanisme konvensi nasional dilakukan 4 hari agar dapat mendapatkan hasil kandidat calon presiden. Hari pertama konvensi nasional adalah mendengarkan laporan-laporan dari komisi mandat (*the credentials committee*). Komisi mandat inilah yang menentukan pengesahan delegasi. Bila timbul persoalan mengenai keabsahan delegasi maka komisi mandat inilah yang akan menyelesaikan, karena delegasi inilah yang akan memilih dan menentukan calon kandidat presiden. (Cipto, 2003:42)

Agenda hari kedua konvensi nasional adalah menyusun platform partai, dalam hal ini agendanya adalah menyusun dan membuat program politik oleh masing-masing kandidat. Program yang biasanya dibahas dalam konvensi ini biasanya menyangkut mengenai isu-isu nasional yang sedang hangat di Amerika. Biasanya penyusunan dalam konvensi ini menjadi ajang konvensi antara masing-masing kandidat calon presiden. (Cipto, 2003:42)

Hari ketiga dalam konvensi nasional adalah agenda untuk menentukan siapa kandidat yang berhasil lolos sebagai calon presiden. Proses pemilihan calon presiden ini dilakukan oleh aktivis politik yang berperan sebagai delegasi dari masing-masing partai politik. Tahap ini biasanya juga dilakukan sebagai kampanye tidak langsung oleh para kandidat presiden dan tim kampanyenya. Setelah itu pada hari keempat lah calon presiden yang berhasil lolos akan disahkan dalam konvensi nasional. (Cipto, 2003, hal. 43)

Dalam konvensi nasional ini selain diikuti kedua partai besar Amerika Serikat, partai Independen seperti partai Hijau, partai Libertarian juga mampu berhasil sampai ke tahap ini tetapi karena kehadirannya yang kurang populer di Amerika Serikat maka kehadiran partai independen ini kadang tidak dianggap oleh warga

Amerika dan tidak mendapatkan suara pada waktu pemilihan umum berlangsung, walaupun partai independen mendapat suara tetapi biasanya mendapatkan suara yang sangat sedikit dan tidak berhasil menang dalam pemilu.

A.3 Kampanye

Kampanye merupakan proses politik yang penting di dalam proses pemilu presiden Amerika Serikat. Kampanye menjadi alat partai politik untuk meyakinkan pemilih loyalis agar tidak memilih partai politik atau kandidat lain dan untuk membujuk pemilih independen yang belum menetapkan pilihannya. Namun, kampanye tidak ditujukan untuk mengubah pilihan pemilih loyalis dari partai berbeda. (Budiatri, 2013)

Ada beberapa faktor penting yang menentukan sukses atau tidaknya kampanye seorang calon Presiden.

a. Citra dan kepribadian calon Presiden

Citra dan kepribadian ini untuk menentukan siapa presiden yang akan dipilih oleh pemilih Amerika Serikat. Maka dari itu apabila seorang kandidat akan mencalonkan diri sebagai pemimpin di Amerika harus menunjukkan citra dan kepribadian yang baik untuk menarik perhatian pemilih, jangan sampai melakukan suatu kesalahan yang fatal. Apabila seorang kandidat pernah menjabat sebelumnya pernah melakukan skandal pasti akan sulit diterima oleh pemilih Amerika Serikat.

b. Antara isu dan Proposal

Seorang kandidat harus memilih isu yang tepat agar pemilih Amerika Serikat tertarik untuk memilihnya. Isu tersebut adalah yang sedang hangat di Amerika Serikat atau isu yang sedang sensitif. Dengan melakukan kampanye untuk melawan isu yang sensitif tersebut maka akan menjawab ketakutan rakyat Amerika yang sedang mengalami hal yang mereka anggap sebagai suatu

ancaman dan membuat diri mereka tidak aman. Jadi pemilihan isu yang tepat ini sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian pemilih Amerika Serikat.

c. Kelebihan calon yang sedang menjabat

Pada umumnya calon-calon Presiden yang sedang menjabat (*incumbent*) memiliki kelebihan dibandingkan dengan calon-calon Presiden yang tidak sedang menjabat. Calon kandidat yang sedang menjabat atau pernah menjabat tentu saja sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dibandingkan dengan kandidat yang belum pernah menjabat sebagai pemimpin di Amerika Serikat. Dengan demikian biasanya calon kandidat yang sedang menjabat biasanya akan lebih dipilih oleh pemilih Amerika Serikat karena pengalaman-pengalaman yang telah ia miliki. (Cipto, 2003)

A.4 Pemilihan Umum (Electoral College)

Electoral College merupakan tahap terakhir yang harus dilalui oleh para calon presiden AS. *Electoral college system* adalah sistem pemilihan presiden di Amerika. Awal mulanya *Electoral College* ini digunakan sebagai sistem pemilu adalah ketika Amerika Serikat didirikan pada akhir abad ke-18, sebuah kampanye nasional hampir tidak mungkin diberikan oleh negara dan sulitnya melakukan komunikasi. Selain itu, AS pada saat itu hanya memiliki sedikit identitas nasional, negara-negara cemburu akan hak-hak mereka, partai-partai politik dicurigai, dan suara rakyat agak ditakuti. Perumusan konstitusi pada tahun 1787 menolak pemilihan presiden oleh Kongres dan pemilihan dengan suara rakyat secara langsung, dengan alasan bahwa orang akan memilih kandidat lokal mereka dan negara-negara besar akan mendominasi. (BBC News, 2016)

Sekalipun pemilihan presiden Amerika selalu dikatakan sebagai pemilihan langsung namun sesungguhnya pemilihan tidak benar-benar dilakukan

secara langsung. Pemilihan dilakukan 2 tahap, yaitu tahap *population votes* dan tahap *electoral votes*. Tahap pertama dilakukan oleh rakyat Amerika yang sudah mempunyai hak pilih secara langsung untuk mendapatkan *population votes*. *Population Votes* merupakan pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat yang sudah mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya kepada calon kandidat yang dipilih. Syarat untuk mendaftar menjadi pemilih presiden adalah sudah berumur minimal 18 tahun, Ia juga harus sudah menetap di suatu negara bagian minimal 30 hari ditambah dengan aturan di setiap negara bagian bahwa setiap orang harus mendaftar ulang untuk menjadi pemilih dalam setiap pemilu yang dilaksanakan.

Tahap kedua adalah pemilihan Presiden oleh para *electors* pemilihan presiden oleh para *electors* yang disebut *electoral votes*. *Elector* merupakan gabungan jumlah dari 2 anggota senat dari masing-masing negara bagian kemudian ditambah dengan anggota *house of representatif* yang jumlahnya berbeda-beda tiap negara bagiannya, jumlah anggota *house of representatif* ini berbeda karena tergantung jumlah penduduk yang ada di negara bagian dan ditambah kuota dari *distric of columbia 3 elector*. Jumlah seluruh *electoral votes* di Amerika Serikat adalah 538, Untuk memenangkan kursi kepresidenan setiap calon harus mampu mengumpulkan minimal 270 *electoral votes*, artinya dengan tidak memperdulikan berapa pun banyaknya dukungan dari pemilih (*population votes*), selama seorang calon mampu mengumpulkan 270 *electoral votes* maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan presiden.

Berikut adalah tabel dari Jumlah *Electoral Votes* di negara bagian Amerika Serikat:

Tabel 2.1
Jumlah Electoral Votes di negara bagian Amerika Serikat
Tahun 2016

<i>Electoral votes by state</i>			
State	Number of Votes	State	Number of Votes
Alabama	9	Montana	3
Alaska	3	Nebraska	5
Arizona	11	Nevada	6
Arkansas	6	New Hampshire	4
California	55	New Jersey	14
Colorado	9	New Mexico	5
Connecticut	7	New York	29
Delaware	3	North Carolina	15
District of Columbia	3	North Dakota	3
Florida	29	Ohio	18
Georgia	16	Oklahoma	7
Hawaii	4	Oregon	7
Idaho	4	Pennsylvania	20
Illinois	20	Rhode Island	4
Indiana	11	South Carolina	9
Iowa	6	South Dakota	3
Kansas	6	Tennessee	11
Kentucky	8	Texas	38
Louisiana	8	Utah	6
Maine	4	Vermont	3
Maryland	10	Virginia	13
Massachusetts	11	Washington	12
Michigan	16	West Virginia	5
Minnesota	10	Wisconsin	10
Mississippi	6	Wyoming	3
Missouri	10		

Sumber : <https://www.britannica.com/topic/United-States-Electoral-College-Votes-by-State-1787124>

Di Amerika Serikat ada negara dengan jumlah *electoral votes* banyak yang diperebutkan oleh calon kandidat untuk mendapatkan suaranya yang disebut

dengan *swing state*, karena apabila calon kandidat telah menang di negara bagian yang memiliki jumlah electoral yang banyak maka calon kandidat akan lebih mudah untuk memenangkan pemilu. Seperti negara bagian California, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Texas, Virginia. (Kompas.com, 2012)

Dalam melakukan pemilihan umum, Amerika menggunakan beberapa prinsip dasar pemilihan umum, yaitu:

a. *Single Member Distric*

Single member distric dapat diartikan sebagai sistem distrik berwakil tunggal yang merupakan sistem pemilihan di Amerika Serikat. Di dalam sistem pemilihan ini, di setiap distrik pemilihan hanya tersedia satu kursi untuk diperebutkan. Satu kandidat mewakili setiap *distric* dan dipilih secara langsung oleh wakil *distric* nya menurut kepartaian masing-masing dan tidak peduli berapapun luas wilayah dan juga kepadatan penduduk di suatu Negara bagian.

b. *Winner Takes All*

Winner takes all merupakan prinsip pemilihan yang ada di Amerika Serikat. Artinya, setiap calon yang menang dalam suatu negara bagian, berapapun jumlah selisih menangnya dia lah yang akan merebut seluruh suara yang ada di negara tersebut. (Fon, 2004)

Dalam sistem pemilihan yang menerapkan *system winner take all*, tidak diperlukan adanya suara mayoritas. Dengan demikian, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dari sebuah *district* maka ia berhak memperoleh kemenangan sekalipun tidak mencapai suara mayoritas. Karena hanya ada satu kursi dalam setiap *distric*, maka yang memenangkan pemilihan di sebuah distrik seolah-olah memenangkan seluruh kursi yang ada.

Calon terpilih tidak tidak harus mencapai mayoritas mutlak (lebih dari 50 persen suara) dan bagi kandidat yang kalah tidak mendapatkan apa-apa.

B. Kontroversi sejarah sistem pemilu Amerika Serikat

Pemilu Pemilihan presiden Amerika Serikat merupakan salah satu pemilu paling rumit di dunia. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat itu, sistem pemilunya malah mengadopsi sistem yang mengundang kontroversi. Kontroversi itu terjadi akibat sistem pilpres AS yang menentukan pemenang dari jumlah suara electoral vote yang ditentukan oleh electoral college. Sistem ini merupakan warisan dari para pendiri negara AS saat menentukan sistem mereka.

Sistem pemilu yang menggunakan Electoral Votes di Amerika sebenarnya menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu. Sistem pemilu ini sangat membingungkan bahkan bagi orang Amerika sendiri, dimana orang Amerika mempunyai hak untuk memilih tetapi hasilnya tidak dapat menentukan siapakah pemenang dari pemilu tersebut. Kemenangan kandidat presiden ditentukan oleh perolehan suara dari elector.

B.1 Kasus Kontroversi Pemilu Amerika Serikat

Dari sistem pemilu yang digunakan di Amerika Serikat ada beberapa kasus yang kontroversi yang pernah terjadi di Amerika Serikat.

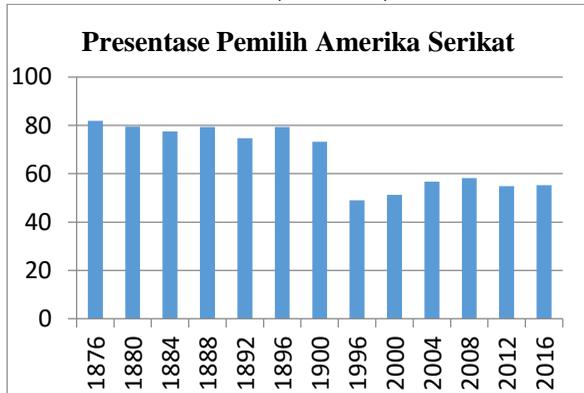
a. Rendahnya Partisipasi Pemilih Amerika Serikat

Pada pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2008, partisipasi pemilih Amerika Serikat hanya sekitar 60%, dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sekitar 230 juta orang, yang ikut menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 130 juta orang. 100 juta lainnya memilih untuk golput. Banyak penyebab kenapa pemilih Amerika Serikat

tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kandidat karena beberapa hal antara lain ketidakpuasan dan keterasingan terhadap sistem politik yang berjalan di AS menjadi salah satu penyebab yang seringkali disampaikan oleh para pengamat politik di Amerika. Argumen lainnya menyatakan bahwa kerumitan proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pendaftaran menjadi pemilih pemilu, menjadi alasan banyak orang untuk golput. Karena syarat untuk mendaftar menjadi pemilih presiden adalah Ia harus sudah menetap disuatu negara bagaian minimal 30 hari ditambah dengan aturan di setiap negara bagian bahwa setiap orang harus mendaftar ulang untuk menjadi pemilih dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Tidak diterapkannya sistem registrasi yang otomatis disebabkan oleh mobilitas warga AS yang sangat tinggi, dimana dalam dua tahun terdapat rata-rata 30% warga AS pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu yang dilakukan di hari kerja dan bukan merupakan hari libur nasional menjadi alasan sebagai warga AS menolak ke tempat pemilihan. (Budiatri, 2013)

Partisipasi pemilih yang rendah bukan hanya terjadi pada pemilu tahun 2008 bahkan dari tahun ke tahun partisipasi pemilih Amerika Serikat sangat sedikit hanya sekitar 50% saja yang menggunakan hak suaranya.

Diagram 2.1
Presentase pemilih Amerika Serikat tahun 1876-
2016 (dalam %)



Diolah dari sumber :

<http://www.presidency.ucsb.edu/data/turnout.php>

Akibat dari syarat-syarat yang cukup memberatkan warga Amerika Serikat pemilih di Amerika mulai malas untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih untuk golput, disamping itu perolehan suara dari rakyat belum tentu akan memenangkan suatu calon kandidat di Amerika Serikat karena sistem yang digunakan. Pada tahun 1870-an hingga 1880-an pemilih di Amerika Serikat sedang banyak-banyaknya yaitu 80 hingga 85% pemilih yang menggunakan suaranya. Namun setelah tahun 1900-an pemilih di Amerika Serikat mengalami penurunan yaitu hanya sekitar 50-60% saja yang menggunakan suaranya, hingga saat ini partisipasi pemilih di Amerika Serikat juga hanya diangka sekitar 50-60 % saja.

Namun perlu diketahui bahwa pemilih di Amerika Serikat pada tahun 1800-an yang mempunyai presentase tinggi yang menggunakan hak pilihnya, pada tahun tersebut hak pilih merupakan sesuatu yang sangat mewah bagi warga Amerika karena pada tahun tersebut belum semua orang mendapatkan hak pilih, hak pilih hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Hak pilih wanita dan kaum kulit hitam mulai diberikan pada sekitar tahun 1900-an ketika Amandemen ke 19 diratifikasi yang memungkinkan bagi wanita untuk dapat ikut serta dalam pemilihan untuk memberikan suaranya, kemudian pada tahun 1965 setelah Undang-Undang Hak Pilih disahkan, kaum kulit hitam di Amerika Serikat baik bagian utara maupun selatan mendapatkan kebebasan penuh untuk memilih. Kemudian perkembangan pada tahun 1970-an hak pilih diberikan untuk warga yang berusia 18 tahun dimana pada awalnya hak pilih tersebut diberikan kepada warga yang berusia 21 tahun.

b. Persoalan Electoral College System

Pada pemilu tahun 2000 kasus yang terjadi pada kandidat antara Bush dan Gore dimana dalam *population votes* Gore lah yang lebih unggul dibandingkan dengan perolehan Bush tetapi Bush lah yang dinyatakan sebagai presiden karena Ia berhasil memenangkan *electoral votes*. Menurut laporan di sejumlah negara bagian, kedua capres bersaing dengan sangat ketat. Florida menjadi wilayah yang disorot pada saat itu. Melihat hal itu, kubu Bush melakukan penghitungan ulang dan akhirnya mereka melihat mereka unggul 300 suara dari jumlah total 6 juta suara. Bush pun meminta Pengadilan untuk intervensi dan melakukan penghitungan ulang. Pengadilan Tinggi Florida akhirnya memerintahkan untuk dilakukan

penghitungan ulang secara manual. Mahkamah Agung pun kemudian ikut menangani masalah ini dan akhirnya menentukan standar baru untuk mencari pemenang di pemilu ini. (Detik News, 2012)

Akhirnya setelah dilakukan penghitungan ulang, para *electoral college* bertemu, dan Bush menerima 271 suara dibandingkan dengan Al Gore yang hanya memperoleh 266 suara. Al Gore pun harus mengaku kalah pada Bush meski dirinyalah yang merebut jumlah *popular votes* dibandingkan Bush dan akhirnya Bush lah yang berhasil menjadi presiden Amerika Serikat tahun 2000. (Detik News, 2012)

Pada tahun 2016 kasus tersebut kembali terjadi antara Trump dan Hillary, dimana Hillary mendapatkan jumlah perolehan *population votes* yang lebih banyak dibandingkan dengan Trump tetapi karena sistem pemilu yang tidak memperhitungkan jumlah perolehan suara pada *population votes* maka Hillary tidak berhasil menjadi presiden karena Ia kalah dalam perolehan *electoral votes*, dalam *electoral votes* Trump lah yang lebih unggul suaranya dan dapat dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi presiden Amerika Serikat.

B.2 Upaya untuk memperbaiki sistem pemilu Amerika Serikat

Untuk mencari solusi dari sistem pemilu ini, Kongres membuat Konvensi Konstitusi pada tahun 1880 pada saat penentuan sistem *electoral college* untuk memilah metode pemilihan presiden. Ada beberapa gagasan dalam konvensi ini :

- a. Presiden akan dipilih secara langsung oleh Kongres dan Badan Legislatif setiap negara bagian tetapi gagasan ini ditolak karena dikhawatirkan akan mengundang tawaran

politik yang tidak sah dan merusak keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan federal. Kemudian Badan legislatif di negara bagian, gagasan ini juga tidak diterima karena akan membuat kedudukan badan legislatif sangat menonjol dan secara tidak langsung mengikis otoritas pemerintah.

- b. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Hanya sedikit delegasi yang setuju. Alasan mereka yakni keraguan terhadap rakyat, sekaligus ketakutan bahwa tanpa informasi yang cukup mengenai para kandidat dari luar negara bagian, masyarakat suatu negara bagian akan secara natural memilih “putra daerah” yang berasal dari negara bagian mereka sendiri. Ada pula kekhawatiran pilpres langsung hanya akan membuat negara besar dan berpenduduk banyak mendominasi pemerintahan dan mengesampingkan negara-negara bagian yang kecil. Ditakutkan terhimpun pula koalisi di antara negara-negara bagian besar membentuk “regionalisme” dari kalangan mereka sendiri. (Hanifan, 2016)

Setelah berdebat panjang, maka dipilihlah sistem Electoral College. Harapannya, sistem ini bisa mengurangi “kecurangan, intrik, dan korupsi” dalam proses pemilu.

Politikus David Barton dalam bukunya *The Electoral College: Preserve It or Abolish It?* menjelaskan mengapa sistem ini yang akhirnya dipilih. Menurutnya, sistem ini memiliki dua filosofi, yakni memelihara bentuk pemerintahan republik dan menyeimbangkan kekuasaan antarnegara bagian dan antardaerah dengan luas wilayah dan latar belakang yang berbeda. Alasan lain menggunakan sistem ini adalah

karena pertimbangan untuk menjaga suara dan kepentingan negara bagian yang kecil dan daerah pedalaman. (Yuliantoro, 2001)

Berbagai upaya telah dicoba untuk mengganti sistem pemilihan di Amerika Serikat tetapi upaya yang dilakukan oleh kongres tidak pernah berhasil dan sistem pemilihan tetap menggunakan sistem electoral college sampai sekarang. Dengan menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan rakyat Amerika Serikat terkait dengan legitimasi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Amerika Serikat maka harus melewati beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh Amerika , tahapan tersebut antara lain tahap nominasi, tahap konvensi nasional, tahap berkampanye dan kemudian dipilih di pemilu dengan sistem *electoral college*. Sistem pemilu yang diterapkan di Amerika Serikat menimbulkan banyak kontroversi walaupun pemerintah sudah mengupayakan untuk melakukan perbaikan namun tetap saja kembali ke sistem *electoral college*. Pada bab berikutnya akan membahas mengenai pelaksanaan pemilu Amerika Serikat dengan calon kandidat Donald Trump dan Hillary yang bersaing cukup sengit untuk dapat merebut jabatan sebagai presiden Amerika Serikat tahun 2016.